

Nomor : B/902/KP 03.02/V/2023 05 Mei 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI

Yth. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama LPNK

Dalam rangka rencana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia, akan diselenggarakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan. Adapun posisi yang lowong adalah sebagai berikut:

NO	NAMA JABATAN	ESELON
1	Kepala Biro Administrasi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	II.a
2	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama dan Organisasi	II.a
3	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	II.a

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara/i untuk dapat menginformasikan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Saudara/i.

Pendaftaran dilaksanakan secara daring pada tanggal **11 s.d. 25 Mei 2023** melalui tautan <https://seleksi.ombudsman.go.id/seleksijpt>. Informasi selengkapnya mengenai teknis pendaftaran dapat dilihat pada pengumuman *sebagaimana terlampir*.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Jenderal,



Marsetiono

Tembusan:

1. Ketua Ombudsman Republik Indonesia
2. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

Lampiran Surat Dinas

Nomor : B/902/KP 03.02/V/2023

Tanggal : 05 Mei 2023

Daftar Nama Kementerian

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Kementerian Dalam Negeri;
6. Kementerian Luar Negeri;
7. Kementerian Pertahanan;
8. Kementerian Agama;
9. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kementerian Keuangan;
11. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Kementerian Kesehatan;
14. Kementerian Sosial;
15. Kementerian Ketenagakerjaan;
16. Kementerian Perindustrian;
17. Kementerian Perdagangan;
18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
20. Kementerian Perhubungan;
21. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
22. Kementerian Perlanian;
23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
24. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
27. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
28. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
29. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
30. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
31. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
32. Kementerian Investasi;
33. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
34. Kementerian Sekretariat Negara.

Daftar Nama Lembaga Pemerintah Non Kementerian

1. Badan Intelijen Negara;
2. Badan Kepegawaian Negara;
3. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
5. Badan Informasi Geospasial;
6. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Badan Narkotika Nasional;
8. Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
9. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
10. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
11. Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
12. Badan Pengawasan Obat dan Makanan;
13. Badan Pusat Statistik;
14. Badan Sandi dan Siber Negara;
15. Badan Standardisasi Nasional;
16. Badan Riset dan Inovasi Nasional;
17. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/ Badan SAR Nasional;
18. Badan Keamanan Laut;
19. Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
20. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
21. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
22. Badan Pemeriksa Keuangan;
23. Badan Pengawas Pemilihan Umum;
24. Badan Pengelola Keuangan Haji;
25. Lembaga Administrasi Negara;
26. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Lembaga Ketahanan Nasional;
28. Arsip Nasional Republik Indonesia;
29. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
30. Mahkamah Konstitusi;
31. Mahkamah Agung;
32. Kepolisian Republik Indonesia;
33. Badan Tenaga Nuklir Nasional
34. Kejaksaan Agung;
35. Komisi Yudisial;
36. Komisi Aparatur Sipil Negara;
37. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
38. Komisi Pemberantasan Korupsi;
39. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
40. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah; dan
41. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat.